



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RADEN ISNANTA
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
3. NHK : 651435

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.370.678.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/27 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 480.653.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m²/27 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 517.800.000
3. Tanah Seluas 199 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 372.225.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 410.000.000

1. MOBIL, NISSAN X-TRAIL JEEP Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. MOBIL, NISSAN X TRAIL JEEP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 239.040.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.760.345.368

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.780.063.368

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.780.063.368

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.